

Judul : Pimpinan komisi V minta Pemda benahi arsitektur
Tanggal : Sabtu, 27 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pimpinan Komisi V Minta Pemda Benahi Arsitektur

WAKIL Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong setiap daerah memiliki tim arsitektur. Ide itu dianggap sejalan dengan upaya menciptakan ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah.

Menurut Huda, ide 'beautiful Indonesia' yang diungkapkan Prabowo merupakan harapan seluruh masyarakat Indonesia. Itu adalah salah satu tujuan bernegara, yakni menciptakan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan kebersihan dan keindahan wilayah.

"Karena itu, kami tentu mendukung pemikiran Presiden untuk menata wilayah terutama di kawasan pariwisata," kata Huda dalam keterangannya, Kamis (25/12/2025).

Ide tim khusus arsitektur tiap daerah, lanjutnya, adalah langkah segar dalam menata wilayah Indonesia. Namun, pelibatan kalangan profesional dan akademisi dari kampus dalam membantu penataan arsitektur daerah jangan menggeser fungsi organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Tata Ruang, Dinas Cipta Karya, atau Dinas Pekerjaan Umum.

Kendati demikian, dia tak memungkiri penataan wilayah kerap terkendala sikap egoistis kepala daerah atau jajarannya. Salah satunya pelanggaran terhadap rencana tata ruang wilayah masih kerap terjadi.

Banyak kasus lahan hijau berubah jadi kawasan industri, lahan pertanian menjadi kawasan hunian, hingga kawasan serapan air menjadi

hutan beton. "Situasi ini terkadang membutuhkan intervensi dari pemerintah pusat untuk menertibkannya," ujar legislator Fraksi PKB itu.

Langkah Prabowo, sambungannya, bisa dimaknai sebagai upaya penertiban pelanggaran tata ruang dan tata wilayah yang selama ini terjadi hingga menciptakan kawasan kumuh, banjir, dan penuh sampah. Namun, partisipasi lokal dan kebijakan penataan wilayah harus tetap terjaga. Kebijakan penataan wilayah harus selaras dengan kewenangan daerah.

"Jangan sampai ruang partisipasi lokal ini menjadi tergerus jika ada kebijakan penataan wilayah yang bersifat *top down*," tutur politikus asal Jawa Barat itu.

Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay menambahkan, wacana Presiden memerlukan aturan hukum yang jelas. Pasalnya, para ahli tidak akan bisa bekerja tanpa landasan yang jelas. Terlebih lagi, sebagian besar kota-kota di Indonesia sudah penuh dan padat.

"Harus dimulai dengan pembentukan aturan hukum yang jelas. Meski jalan ini sulit, tapi kalau tidak ada jalan lain, ya harus tetap ditempuh," kata Saleh.

Lebih lanjut, kata dia, rencana Prabowo mengadakan tim arsitektur perkotaan perlu diapresiasi. Program itu sangat baik menjawab berbagai isu perkotaan dan kependudukan saat ini. Apalagi, tingkat kepadatan penduduk, kemacetan, lapangan pekerjaan, patologi sosial, dan berbagai problematika kehidupan sosial sangat jelas di depan mata. ■ PYB